

LAPORAN KEGIATAN BPJS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BULELENG



JANUARI – DESEMBER 2024

Bersama ini disampaikan kepada Bapak PJ. Bupati Kabupaten Buleleng tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng per 31 Desember 2024.

1. Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Buleleng Singaraja merupakan Kantor Cabang Kelas 3A yang bertempat di Jl. Kartini No 6A yang bertugas untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat pekerja akan akses perlindungan serta layanan yang komprehensif akan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Buleleng.

Kabupaten Buleleng memiliki 9 Kecamatan yang berdasarkan data Badan Statistik Pusat Kabupaten Buleleng memiliki data Tenaga Kerja sebagai berikut :

No	Kategori	Jumlah	Sumber
1	Jumlah Penduduk	826.740	Satu Data Buleleng 2023
2	Angkatan Kerja	473.440	BPS Buleleng 2023
3	Pengangguran	17.051	BPS Buleleng 2023

2. Pembayaran Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-undang BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 5 Program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk melindungi risiko sosial bagi seluruh pekerja baik pekerja penerima upah/formal, pekerja bukan penerima upah/informal dan tenaga kerja di sektor jasa konstruksi.

Manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dalam bentuk klaim/jaminan yang telah dibayarkan kepada peserta yang ada di Kabupaten Buleleng selama periode Tanggal 1 Januari – 31 Desember 2024 sebesar Rp 81.477.848.796 dengan total penerima manfaat 3.748 orang, terdiri dari:

No	Program	Kasus	Manfaat
1	JHT	2.666	Rp. 45.434.344.340
2	JKK	83	Rp. 501.529.636
3	JKM	863	Rp. 34.433.000.000
4	JP	124	Rp. 1.091.610.180
5	JKP	12	Rp. 17.364.640
Total		3.748	Rp. 81.477.848.796

Adapun manfaat lain yang telah kami lakukan adalah:

Pembayaran manfaat beasiswa BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, dimana beasiswa diberikan kepada anak tenaga kerja yang meninggal dunia dan mengalami kecelakaan kerja yang masih menempuh pendidikan. Jumlah manfaat yang telah dibayarkan kepada peserta yang ada di Kabupaten Buleleng selama periode 1 Januari – 31 Desember 2024 sebanyak 91 pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Kasus	Manfaat	Keterangan
1	TK/SD	29	Rp. 43.500.000	Rp. 1.500.000 per Anak/Tahun
2	SMP	15	Rp. 37.000.000	Rp. 2.000.000 per Anak/Tahun
3	SMA	24	Rp. 87.000.000	Rp. 3.000.000 per Anak/Tahun
4	KULIAH	23	Rp. 336.000.000	Rp. 12.000.000 per Anak/Tahun
Total		91	Rp. 503.500.000	

3. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng

Tenaga kerja aktif yang dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 76.752 orang yang terdiri dari 35.964 pekerja penerima upah/ formal yang tersebar di 1.988 pemberi kerja/badan usaha, 39.032 pekerja bukan penerima upah, dan 1.756 pekerja di sektor jasa konstruksi, dengan rincian sebagai berikut :

Tenaga Kerja	Peserta Aktif	Jumlah Pekerja Data BPS Buleleng 2023	Coverage
Pemberi Kerja / Badan Usaha	1.988	456.389 (dikurangi pengangguran)	
Formal / PU	35.964		5,63%
Informal / BPU	39.032		8,04%
Jakon	1.756		0,53%
Total	76.752		

Dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng, Kantor Cabang kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan Kepesertaan.

Berikut adalah rincian perkembangan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng:

No	Tenaga Kerja	Desember 2023	Desember 2024	Perkembangan
1	Formal / PU	24.951	35.964	44%
2	Informal / BPU	27.903	39.032	39%
3	Jakon	5.529	1.756	-69%

- Menurunnya sektor JAKON akibat banyaknya proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Buleleng yang sudah selesai pekerjaannya.

4. Peraturan Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng

Peningkatan perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Bali telah didukung dengan adanya regulasi atau peraturan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, berikut regulasi di Kabupaten Buleleng yang mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan:

No	Regulasi	Nomor	Perihal
1	Peraturan Daerah	8 Tahun 2016	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
2	Peraturan Bupati	28 Tahun 2022	Standar Biaya Honorarium, Uang Jasa, Hadiah dan Lembur

5. Dukungan yang diharapkan dalam Peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mohon perkenan kiranya dukungan dan arahan lebih lanjut dari Bapak Pj. Bupati guna optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang ada di Kabupaten Buleleng, untuk hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Optimalisasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Ekosistem Desa yang melakukan kegiatan ketenagakerjaan, terdiri dari Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Posyandu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Kerjasama antar Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- b. Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan yang ada di Kabupaten Buleleng, yang dimaksud Pekerja Rentan adalah masyarakat yang ada dalam ambang kemiskinan dan rentan terhadap kehidupannya dalam jangka panjang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Buleleng Tahun 2023 terdapat 5,39% penduduk miskin atau sebesar 36,5 ribu jiwa. Agar tidak masuk kedalam kategori kemiskinan ekstrim maka diperlukan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- c. Berdasarkan Satu Data Indonesia Provinsi Bali, terdapat 170 Desa Adat di Kabupaten Buleleng dan baru sebagian kecil yang masuk menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk itu perlu adanya dorongan dari Pemerintah Kabupaten Buleleng agar seluruh Desa Adat mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena Desa Adat merupakan salah satu tulang punggung dalam pelestarian Adat dan Budaya Bali di Kabupaten Buleleng.

Demikian disampaikan, atas dukungan Bapak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja di Kabupaten Buleleng, kami ucapkan terima kasih.